



### ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DI STAI MUHAMMADIYAH BLOORA

**Rina Murtyaningsih**

STAI Muhammadiyah Bloro

[rinamurty81@gmail.com](mailto:rinamurty81@gmail.com)

#### Article History

Received : 28-01-2024

Revised : 29-02-2024

Accepted : 21-03-2024

Published : 09-04-2024

**Abstract:** Analisis ini meneliti penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi (SMPT) dalam mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di STAI Muhammadiyah Bloro. *Good University Governance* (GUG) menjadi elemen penting dalam reformasi PTS, menekankan pada struktur tata kelola, otonomi, akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi. Struktur tata kelola yang jelas, otonomi yang memadai, akuntabilitas yang tinggi, kepemimpinan yang efektif, dan transparansi yang terjaga menjadi kunci utama. Implementasi SMPT yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, akuntabilitas publik, dan kepercayaan *stakeholders*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau fenomena praktik di STAI Muhammadiyah Bloro. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran SMPT dalam mewujudkan GUG untuk PTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi di STAI Muhammadiyah Bloro, sistem pengendalian terdiri dari beberapa sistem dan tindakan: sistem penjaminan mutu; jaminan kepuasan pelanggan; pengawasan dan dokumentasi complain stakeholder; manajemen berdasarkan fakta; dan perbaikan kesinambungan.

**Keywords:** Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi (SMPT), *Good University Governance* (GUG), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Tata Kelola, Akuntabilitas, Transparansi.

## **PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi berfokus pada memecahkan tantangan global dan bagaimana tetap eksis dan beroperasi dengan efisien untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. sehingga perguruan tinggi harus mempunyai tatanan yang baik, dan memiliki manajemen yang baik, (Ni Nyoman Ayu Suryandari., SE., MSi., AK. et al. n.d.)

Secara sederhana, Good University Governance adalah penerapan manajemen perusahaan yang baik di perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Manajemen perguruan tinggi yang baik mampu menjamin keberlangsungan hidup perguruan tinggi dengan melakukan manajemen yang berkualitas. Manajemen perguruan tinggi yang baik diyakini mampu mengatasi dan mengatasi masalah yang terkait dengan pendidikan. (Widjajanti and Sugiyanto 2015)

Perguruan tinggi adalah pusat pengetahuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mereka juga berfokus pada kemampuan mereka untuk bersaing dan mempertahankan kepentingannya. Harga, produk, dan layanan adalah elemen yang menjadi tuntutan bagi bisnis yang berorientasi pada profit. Tidak berbeda dengan organisasi profit, organisasi nonprofit seperti perguruan tinggi juga harus mempertimbangkan hal ini. (Dalimunthe, Wardah, and Siregar 2021) Pendidikan tinggi di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai salah satu pilar pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. (Nasir et al. 2020) Dalam

rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, PTS perlu menerapkan tata kelola yang baik (*Good University Governance / GUG*).

Manajemen perguruan tinggi mencakup manajemen akademik, organisasi, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan. (Nengsih, Adnan, and Eriyanti 2019) Meskipun perguruan tinggi yang baik memiliki prinsip yang sama, implementasinya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan keyakinan yang dianut. Oleh karena itu, konsep ini bukanlah ide yang baku. (Pratama et al. 2020). GUG menekankan pada struktur tata kelola yang jelas, akuntabel, dan transparan, serta kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. (Yati Siti Mulyati 2015)

Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi tidak terlibat dalam konflik kepentingan. (Hapsari and Suhadi 2023) Akuntabilitas perguruan tinggi berarti sistem akuntansi yang dapat diperiksa dan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. (Al and Nim 2015) Responsibilitas berarti bahwa ada deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, dan prosedur operasional yang jelas. (Nurlatifah, Suratman, and Hariyati 2021)

Penerapan GUG di PTS dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, akuntabilitas publik, dan kepercayaan *stakeholders*. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan GUG adalah Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi (SMPT). SMPT merupakan sebuah sistem yang mengatur pengelolaan pendidikan tinggi di PTS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. SMPT yang efektif dapat membantu PTS dalam mencapai tujuan strategisnya dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. (Mulyani, Muawanah, and Ahmad 2023)

PTIS mengalami banyak tantangan sebagai institusi swasta, terutama dalam hal pembiayaan dan independensi. PTS, termasuk PTIS, lebih banyak bergantung pada pengumpulan dana secara mandiri, berbeda dengan PTN yang biasanya menerima subsidi pemerintah. Sumber daya PTS masih sangat bergantung pada pembayaran mahasiswa. PTS masih menghadapi keterbatasan sumber daya seperti sarana prasarana, input, kualitas manajemen, dukungan pemerintah yang kurang, dan masalah pendanaan. (Purnama and Sailah 2017) PTIS masih terbebani dengan agenda utama untuk meningkatkan penghasilan karena banyak kepentingan yang berpartisipasi dalam pengelolaan PTS. Ini terutama berlaku untuk upaya bisnis pendidikan melalui PTS untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan akan menyulitkan PTIS untuk mencapai tata kelola Perguruan Tinggi yang baik jika mereka tidak dapat berdiri sendiri dalam hal pendanaan. Kualitas pengelolaan akan menurun karena campur tangan berbagai kepentingan tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi PTS, termasuk PTIS, untuk menjadi PT yang berkualitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau fenomena praktik Good University Governance (GUG) pada PTIS di STAI Muhammadiyah Blora dengan setting penelitian.

Beberapa metode digunakan untuk memperoleh data penelitian ini, antara lain:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara mendalam terkait kondisi lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil PTS.

2. Wawancara dengan narasumber, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci.
3. Focus Group Discussion dengan beberapa akademisi, dan pihak-pihak terkait. Ini untuk menyediakan ruang seluas-luasnya untuk bertukar pandangan dan berbagi informasi. Proses ini juga digunakan untuk mendorong kesadaran kritis PTIS agar dapat memahami permasalahan yang ada.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### *Deskripsi PTIS dan Informan*

Setting penelitian analisis penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi dalam mewujudkan *good university governance* di STAI Muhammadiyah Blora. Pemilihan atas setting penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan data atau dokumen yang akan diteliti. Berikut data yang digunakan tercantum dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Jenis Data Yang Ditemukan Dalam Penelitian**

No.	Jenis Data	Sumber	Teknik Memperoleh Data
1.	Visi-Misi PTIS, Statuta, SOP, Data Pemutu, dan dokumen pendukung lainnya	PTIS Bersangkutan	Jurnal, Pangkalan Data Perguruan Tinggi
2.	Respon Stakeholfer PTIS	PTIS Bersangkutan	Kunjunagn lapangan dan pengamatan
3.	Penerapan prinsip Good University Governance (GUG)	Key Person	Survey, interview mendalam dengan tokoh kunci di PTIS

**Tabel 2**  
**Deskriptor Informan Prodi, Dosen dan Mahasiswa STAI Muhammadiyah Blora**

No	Nama Program Studi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen
1.	S.1 Pendidikan Agama Islam	225	6
2	S.1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	95	6
3	S.1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	190	6

**Tabel 3**  
**Deskripsi Informan STAI Muhammadiyah Blora Tentang Peran, Tugas, Dan Jenis Informasi Yang Diberikan Oleh Masing-Masing Tipe Informan**

No	Tipe Informan	Peran dan Tugas	Jenis Informan yang Diberikan
1.	Ketua	Mengelola dan memimpin, menetapkan visi dan misi, kebijakan strategis, dan pengembangan kampus.	Visi dan misi, kebijakan strategis, kemitraan, pengembangan, dan prestasi kampus.
2	Dosen	Mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan kurikulum, dan pembimbingan mahasiswa.	Kurikulum, metode pengajaran, fasilitas penelitian, dinamika kelas, dan kebijakan akademik.
3	Mahasiswa	Belajar, berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik.	pengalaman belajar, kehidupan kampus, kegiatan ekstrakurikuler, dukungan mahasiswa, dan kualitas pengajaran.
4	Staf Administrasi	Menyediakan dukungan administratif untuk operasional kampus.	Proses administratif, layanan kampus, manajemen fasilitas, dan kebijakan operasional.
5	Alumni	Lulusan yang meniti karir dan menjaga hubungan dengan	Kualitas pendidikan, relevansi program studi terhadap karir,

		almamater.	jejaring alumni, dan kontribusi terhadap masyarakat.
6.	Pengelola Program Studi	Mengelola dan mengawasi pelaksanaan program studi, termasuk kurikulum dan evaluasi akademik.	Spesifikasi program studi, akreditasi, kurikulum, dan pencapaian akademik.

**Deskripsi masing-masing prinsip dalam *good university governance*.**

**Transparansi (keterbukaan)**

Transparansi adalah prinsip utama dalam manajemen perguruan tinggi yang baik. Perguruan tinggi harus menerapkan transparansi melalui berbagai mekanisme. Mekanisme pengendalian dan penyeimbangan harus ada dalam pengelolaan institusi.

Mekanisme ini dapat berupa tanggung jawab Senat Akademik di tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi (prodi) untuk melakukan fungsinya terhadap rektor/ketua dan dekan. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi di STAI Muhammadiyah Blora survei awal dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada dosen dan senat akademik di lingkungan kampus STAI Muhammadiyah Blora

**Table 4**  
**Hasil Survei Penelitian**

No	Uraian Pertanyaan	Beberapa dosen yang menjawab dalam nilai angka 1-10			
		1	2	3	4
1	PTS menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya	8	7	9	7
2	Terdapat mekanisme check and balances dalam pengelolaan perguruan tinggi Bapak/Ibu	7	8	9	9
3	Senat Akademik di Tingkat Perguruan Tinggi telah menjalankan	6	7	5	6

	fungsi control terhadap Rektor dan Dekan				
4	Senat Akademik di Tingkat Program Studi telah menjalankan fungsi control terhadap Rektor dan Dekan	5	6	6	5
5	Visi Misi PTS telah tertulis	9	8	9	7

Hasil survei awal yang dibagikan kepada stakeholder di STAI Muhammadiyah Blora menunjukkan bahwa PTS telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya. Prinsip transparansi diwujudkan melalui mekanisme check and balances, yaitu dengan adanya Senat Akademik dan program studi. Namun, Senat Akademik di tingkat perguruan tinggi dan prodi belum melakukan tugas kontrol mereka dengan baik terhadap ketua STAI Muhammadiyah Blora. Seting penelitian memiliki visi dan misi yang jelas yang menunjukkan kepada masyarakat apa yang PTS ingin capai dan cara mewujudkannya.

Dilakukan observasi dan wawancara menyeluruh dengan berbagai figur penting untuk memastikan bahwa jawaban dari survei pendahuluan konsisten. Prinsip transparansi diwujudkan melalui tugas senat akademik untuk mengontrol ketua, sesuai dengan temuan wawancara. Di tingkat prodi, Senat Akademik melakukan berbagai aktivitas secara formal dan informal untuk memenuhi aspirasi dosen. Rapat tingkat jurusan dan kegiatan informal lainnya adalah aktivitas yang biasa dilakukan. Senat akademik akan menyampaikan aspirasi mereka kepada semua karyawan dna dosen, yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Secara langsung, dapat dilihat bahwa STAI Muhammadiyah Blora telah menulis Visi dan Misi dengan jelas, baik melalui banner di kampus, kalender yang diberikan



kepada mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan, maupun buku saku yang dirancang untuk menyebarkan Visi dan Misi ke seluruh civitas akademika.

**Akuntabilitas (bentuk kewajiban pertanggungjawaban)**

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta terkait erat dengan tujuan perguruan tinggi, yaitu menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya. penyelenggara pendidikan. Perguruan tinggi ditugaskan oleh tiga entitas: pemerintah sebagai pemberi ijin, masyarakat sebagai pengguna, dan penyelenggara sebagai pemilik. Karena karakteristik ini berlaku, perguruan tinggi dapat didirikan dan program studi dapat dilaksanakan dengan izin pemerintah dari Kementerian Ristek Dikti. Selain itu, sifat akuntabilitas sangat terkait dengan pengelolaan keuangan. Dengan karakteristik ini, PTS yang memperoleh dana untuk kegiatan operasional dari berbagai sumber harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan melaporkan kepada pemerintah, masyarakat, dan badan penyelenggara tentang bagaimana dana digunakan. Prinsip akuntabilitas PTS melibatkan audit akuntan publik. Laporan Keuangan harus dipublikasikan. Dilakukan survei wawancara terhadap empat PTIS di Kabupaten Blora untuk mengetahui implementasi prinsip akuntabilitas pada PTIS tersebut. (Fuad and Apriyanti 2018)

Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas masih kurang diterapkan pada kampus STAI Muhammadiyah Blora dalam beberapa hal. Dilakukan observasi dan wawancara menyeluruh dengan ketua/wakil ketua yang bertanggung jawab atas pengelolaan GUG, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan laporan keuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kampus STAI Muhammadiyah Blora

bertanggung jawab atas pelaksanaan visi misi, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dan pengelolaan dana dan laporan keuangan. Kantor akuntan publik telah mengaudit Laporan Keuangan PT dan dipublikasikan kepada publik. Informasi non-keuangan dapat diakses hanya jika diperlukan masyarakat. Hanya dalam konteks kepatuhan terhadap pemerintah melalui kemenristek dikti, informasi yang lengkap diberikan.

**Responsibility (tanggungjawab)**

Prinsip rekonsiliasi harus diterapkan dalam konteks peraturan perguruan tinggi. Prinsip tanggung jawab diterapkan pada pembagian posisi, fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan setiap komponen organisasi. Pembagian ini digambarkan dalam deskripsi pekerjaan karyawan dan standar prosedur operasional (SOP) yang jelas. Pemilihan staf dan pejabat berdasarkan kompetensi dan riwayat kerja mereka, serta penerapan sistem kompensasi yang tepat untuk pegawai. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang penerapan prinsip Responsibility kampus STAI Muhammadiyah Blora, Hasil survei ini dapat dilihat pada table 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
**Deskripsi pertanyaan dan hasil survey pendahuluan prinsip responsibility**

Responsibility	Penilaian dari beberapa pihak 1-10			
	1	2	3	4
Setiap individu dalam PTS bertanggung jawab atas segala tindakan sesuai <i>job description</i> yang telah diterapkan	9	8	8	9
Dosen mematuhi etika dan norma dosen	7	7	8	7
Pembagian kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan setiap unsur organisasi dilakukan dengan baik	2	3	2	1

PTS memiliki <i>standard operating procedure</i> (SOP) untuk setiap aktifitas	8	8	8	8
Pengangkatan pegawai dan bejabat dilakukan berdasarkan kopetensi dan <i>track record</i>	1	2	1	1
Telah di berikan merit system (insentif dan dis-insentif) yang tepat bagi pegawai	1	5	2	3

Informasi pendukung tentang tanggung jawab diperoleh berdasarkan hasil survey diatas. Kampus STAI Muhammadiyah Blora menghadapi masalah ketidaksadaran setiap orang, tentang tanggung jawab atas setiap aktivitas sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Sebagian besar dosen tidak memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi karena alasan insentif dan dis-insentif yang dianggap tidak tepat bagi mereka. Akibatnya, sebagian besar dosen akan memilih aktivitas lain yang dianggap lebih menginsentif daripada aktivitas tri dharma PT.

Sebagai hasil dari wawancara yang mendalam, beberapa PTIS menyatakan bahwa mereka akan terus mengembangkan sistem yang lebih sesuai untuk insentif dan insentif dosen, terutama yang berkaitan dengan insentif. Ini dilakukan karena insentif yang diberikan kepada dosen hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan pokok dan belum dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat tersier. Kemampuan kampus untuk mendapatkan dana sangat memengaruhi perkembangan sistem ini, terlebih lagi sampai saat ini STAI Muhammadiyah Blora masih bergantung pada badan penyelenggara sebagai pemilik. Struktur organisasi yang besar dengan lebih banyak karyawan daripada yang diperlukan menambah beban PTIS. Ini terjadi karena pembagian yang kurang baik antara kedudukan, fungsi, tugas, tanggungjawab,

dan kewenangan setiap bagian dari organisasi pada awal berdirinya PTIS. Akibatnya, kampus tidak memiliki daya tarik untuk mengangkat karyawan dengan kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, tidak memiliki pilihan lain selain mengangkat karyawan baru dengan berbagai kompetensi.

### **Independensi (dalam pengambilan Keputusan)**

PTIS harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri, yang berarti keputusan yang dibuat oleh PTIS seharusnya bebas dari tekanan dari pihak mana pun, termasuk Badan Penyelenggara, yang bertanggung jawab atas PT. Akibatnya, Badan Penyelenggara harus memberikan Rektorat wewenang sepenuhnya untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dilakukan wawancara untuk mengetahui penerapan prinsip independensi di kampus STAI Muhammadiyah Blora.

Hasil observasi secara langsung menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara yayasan dan kampus STAI Muhammadiyah Blora. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ada mekanisme untuk menyampaikan usulan dari Fakultas dan tingkat prodi. Hal ini ditentukan oleh cara pimpinan berkomunikasi dan memimpin, yaitu pada rapat pimpinan yang dilakukan secara rutin dengan dosen dan karyawannya.

### **Fairness (adil)**

Sebagai perguruan tinggi Islam, prinsip ini harus diterapkan dengan baik. Ini karena, selain menjadi bagian dari Good University Governance yang diwajibkan oleh Kemenristek Dikti, keadilan juga merupakan salah satu karakteristik islami yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi dengan visi nilai islami. Perguruan tinggi melakukan keadilan

ini untuk masyarakat, mahasiswa, dosen, karyawan non akademis, dan pengurus yayasan.

Hasil observasi langsung menunjukkan bahwa, mahasiswa dilayani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara dosen dan karyawan memberikan layanan.

### **Penjaminan Mutu dan Relevansi**

Penjaminan mutu internal menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi BAN-PT untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi di Fakultas. Selain itu, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai cara, seperti sertifikasi profesi dosen, menerima umpan balik mahasiswa, mempromosikan hubungan alumni, dan melakukan survei tentang layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan pengguna. (Perumus, Umum, and Jaya 2018)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fungsi penjaminan mutu internal di STAI Muhammadiyah Blora secara keseluruhan belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya insentif untuk tugas penjaminan mutu dan kurangnya penugasan yang jelas. Perguruan tinggi biasanya kurang memanfaatkan penelitian dengan baik yang sudah dilakukan.

### **Efektifitas dan Efisiensi**

PTIS harus melakukan perencanaan, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek (tahunan), untuk menjaga efektifitas dan efisiensi. Ini dilakukan melalui Rencana Strategis (Renstra), yang biasanya dibuat dalam jangka panjang, lima tahunan, maupun jangka pendek, dan akan digunakan untuk membangun perencanaan jangka pendek.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa melakukan perencanaan tahunan dengan pola yang hampir sama, yaitu :

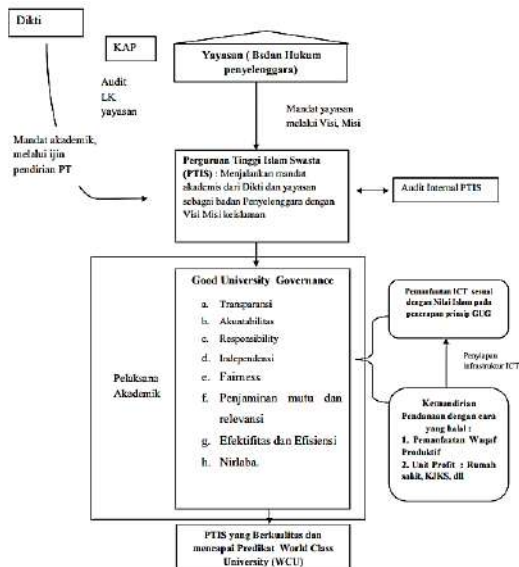
1. Rapat Program Studi untuk menetapkan program kerja.
2. Rapat di tingkat fakultas terdiri dari dekanat dan pimpinan prodi
3. Rapat di tingkat perguruan tinggi membahas rencana anggaran dan belanja tahunan.
4. Badan penyelenggara PT menyetujui rencana anggaran dan belanja tahunan.

### **Nirlaba**

Sesuai dengan tugas dan peran PTIS dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PTIS seharusnya berprinsip nirlaba. Prinsip ini menyatakan bahwa anggaran yang dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi hanya untuk mencari keuntungan pribadi pemilik, badan penyelenggara, atau pihak lain. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk menemukan ide-ide yang tepat yang berkaitan dengan prinsip nirlaba. Hasilnya menunjukkan bahwa ketua dan wakil ketua memiliki gagasan bahwa kampus harus mulai mengembangkan gagasan kemandirian dalam hal pendanaan. Ini akan memungkinkan penerapan lebih lanjut dari prinsip kepemimpinan perguruan tinggi yang baik.

### **Perumusan Model Penguatan Good University Governance pada PTIS.**

Berdasarkan hasil pembahasan, baik melalui studi dokumentasi, survey pendahuluan, observasi lapangan, dan wawancara, menunjukkan model penguatan *good university governance* untuk STAI Muhammadiyah Blora pada gambar 1 berikut ini :



**Gambar 1**  
**Model Penguatan *Good University Governance***  
**di STAI Muhammadiyah Blora**

## KESIMPULAN

Kualitas kampus STAI Muhammadiyah Blora dapat ditingkatkan dengan memperkuat penerapan *Good University Governance* (GUG). Visi dan Misi tidak hanya harus didasarkan pada nilai-nilai Islami, tetapi juga harus menjalankan amanat pembentukan Perguruan Tinggi sebagai lembaga nirlaba. Visi dan Misi juga harus didasarkan pada mandat yayasan sebagai badan penyelenggara dan dikti sebagai pemberi ijin pendirian PT. Penguatan penerapan GUG pada PTIS harus didukung oleh kemandirian pendanaan yang kuat. Ini dapat dimulai dengan membangun badan usaha yang menghasilkan keuntungan, seperti rumah sakit, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan pemanfaatan waqaf produktif.

STAI Muhammadiyah Blora juga membutuhkan dana untuk menyiapkan infrastruktur dalam pemanfaatan ICT untuk setiap prinsip GUG.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap prinsipnya, konsep *Good University Governance* (GUG) di kampus STAI Muhammadiyah Blora lebih bermanfaat. Internalisasi adalah peneguhan identitas yang membedakan PTIS dari PTN dan PTS lainnya. Dengan model penguatan ini, PTIS dapat berkembang menjadi PTIS berkualitas tinggi dan dapat diterima di Universitas Kelas Dunia (WCU). (Ngindana, Rachmatullah Putra, and Albertus 2020)

## REFERENSI

Al, Hanif, and Kadri Nim. 2015. “( Studi Tentang Akuntabilitas Kinerja Di Universitas Negeri Padang Dan Universitas Andalas Provinsi Sumatera Barat ) ( Case Study on the Performance Accountability at Universitas Negeri Padang and Universitas Andalas Provinsi Sumatera Barat ) Accountabili.” (8).

Dalimunthe, Sholatia, Nabilah Wardah, and M. Edo Suryawan Siregar. 2021. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Diversifikasi Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Household Goods Yang Terdaftar Di Bursa Malaysia Periode 2014-2018.” *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 12(1):100–122.

Fuad, Khoirul, and Werdi, Hani Apriyanti. 2018. “Implementasi Good University Governance (Gug) Pada Perguruan Tinggi Islam Swastadi Jawa Tengah.” *Majalah Ilmiah Solusi* 16(1):148–76.

Hapsari, Yuli Retno, and Suhadi. 2023. “Manajemen Satuan



- Pendidikan: Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup.” *Promis* 4(1):h. 68-70.
- Hidayat, Yayat, Alfiyatun Alfiyatun, Euis Hayun Toyibah, Ina Nurwahidah, and Doni Ilyas. 2023. *Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 6.
- Mulyani, Yulia Marga, Umii Muawanah, and Ahmad. 2023. *Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta*.
- Nasir, Adam, Rahmawati, Arfin, Mujiati, and Rahmiatin Titin. 2020. “Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan Dan Retensi SDM Di Perguruan Tinggi Swasta.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):200.
- Nengsih, Widya, Fachri Adnan, and Fitri Eriyanti. 2019. “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2(1):112–24. doi: 10.24036/jmiap.v1i2.26.
- Ngindana, Rispa, Langgeng Rachmatullah Putra, and Rinaldo Albertus. 2020. “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Untuk Mewujudkan Good University Governance.” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2(2):152. doi: 10.33474/jisop.v2i2.6726.
- Ni Nyoman Ayu Suryandari., SE., MSi., AK., CA, Klik untuk baca: Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Good University Governance,” [https://www.kompasiana.com/akuntansiumas/5da94df2097f3604d87fc465/good-university-governance#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/akuntansiumas/5da94df2097f3604d87fc465/good-university-governance#google_vignette), Kreator: Akuntansi FEBUnmas, Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas., and Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.com. n.d. “No Title.”

- Nurlatifah, Amira, Bambang Suratman, and Hariyati. 2021. “Pola Pengelolaan Good University Governance Badan Layanan Umum.” *Journal of Accounting Science* 5(1):29–35. doi: 10.21070/jas.v5i1.429.
- Perumus, Ketua Tim, Ketua Umum, and Yayasan Sahid Jaya. 2018. “Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola.” 5840816(84):1–5.
- Pratama, Bima Cinintya, Maulida Nurul Innayah, Akhmad Darmawan, Naelati Tubastuvi, and Nur Isna Inayati. 2020. “CORPORATE GOVERNANCE: Teori, Perspektif, Dan Praktik.” (April):390.
- Purnama, Adhy, and Ilah Sailah. 2017. “Peningkatan Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Kualitas Pelayanan Pelatihan Jurnal Berkualitasmelalui Metode Servqual.” *Jurnal Manajemen* 21(3):418. doi: 10.24912/jm.v21i3.260.
- Widjajanti, Kesi, and Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto. 2015. “GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN EXCELLENT SERVICE DAN KEPERCAYAAN MAHASISWA (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang).” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1):69. doi: 10.26623/jdsb.v17i1.504.
- Yati Siti Mulyati, Aan Komariah. 2015. *Manajemen Pendidikan*.